ANALISIS PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN DISPARITAS PENDAPATAN REGIONAL

(Studi Kasus Perbandingan Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia Tahun 2001-2018)

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh:

Tri Suharyanto
165020100111017

JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2020

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

ANALISIS PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN DISPARITAS PENDAPATAN REGIONAL
(Studi Kasus Perbandingan Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia Tahun 2001-2018)

Yang disusun oleh :

Nama	:	Tri Suharyanto
NIM	:	165020100111017
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis
Jurusan	:	S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai ***persyaratan ujian skripsi*** yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal …….. (diisi tanggal ujian)

Malang, 22 Juli 2020

Dosen Pembimbing,

Prof. Candra Fajri Ananda
NIP. 196410291989031001

Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Regional
(Studi Kasus Perbandingan Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia Tahun 2001-2018)

Tri Suharyanto
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang
Email: suharyantotri34@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan disparitas pendapatan regional di Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia. Hal ini karena terdapat perbedaan pertumbuhan ekonomi dan disparitas pendapatan regional antar kawasan di Indonesia. Sementara, melalui kebijakan desentralisasi fiskal, setiap daerah memiliki keleluasaan untuk mengelola potensi daerahnya masing-masing. Desentralisasi fiskal dalam penelitian ini menggunakan pengukuran indikator otonomi I, indikator otonomi II, rasio belanja modal, dan kemampuan keuangan daerah. Metode yang digunakan adalah kuantitatif sekunder dengan alat analisis jalur. Hasil penelitian menghasilkan temuan bahwa sejak desentralisasi fiskal berlakukan, tidak ada perbedaan pertumbuhan ekonomi dan disparitas pendapatan regional di Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia.

Kata kunci: Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, Disparitas Pendapatan Regional, Indikator Otonomi I, Indikator Otonomi II, Rasio Belanja Modal, Kemampuan Keuangan Daerah.

A. PEDAHULUAN

Desentralisasi fiskal merupakan pemberian wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri keuangan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Penyelenggaraan desentralisasi fiskal disertai juga dengan pembagian wewenang dengan konsep *money follow function*. *Money follow function* merupakan pembagian wewenang mengenai keuangan berdasarkan tugas-tugas yang dilaksanakan (Bahl, 1998 dalam Apriesa & Miyasto, 2013). Desentralisasi fiskal mulai diberlakukan sejak tahun 2001 yang dalam pelaksanaannya pemerintah daerah akan diberikan sumber-sumber pendanaan oleh pemerintah pusat. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk pendanaan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi meliputi: Pendapatan Asli Daerah (PAD); Dana Alokasi Umum (DAU); Dana Bagi Hasil (DBH); Dana Alokasi Khusus (DAK); pinjaman daerah; dan lain-lain penerimaan yang sah. Desentralisasi fiskal bertujuan untuk memenuhi aspirasi daerah menyangkut penguasaan atas sumber-sumber keuangan negara, mendorong akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah, meningkatkan pastisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah, mengurangi ketimpangan antar daerah, menjamin terselenggaranya pelayanan publik minimum di setiap daerah, dan pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahterahaan masyarakat secara umum (Simanjuntak, 2002).

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan kondisi penduduk yang bervariasi baik dari segi suku, budaya, agama, dan bahasa. Setiap daerah di Indonesia dalam melaksanakan pembangunannya mengharapkan terjadinya pertumbuhan ekonomi yang

tinggi dan pemerataan. Proses pembangunan daerah selalu diarahkan pada pemerataan dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi sebagai sebuah proses peningkatan output dari waktu ke waktu menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara (Todaro, 2005). Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah pun harus mampu mengatasi ketimpangan pendapatan. Sehingga, akan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya. Adapun dalam pengembangan, wilayah Indonesia dibagi menjadi Kawasan Timur Indonesia dan Kawasan Barat Indonesia. Kawasan Indonesia Timur mencakup pulau Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Sedangkan, Kawasan Barat Indonesia mencakup pulau Sumatera, Jawa, dan Bali (Bappenas, 2016).

Gambar 1. 1 **Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2014-2018**

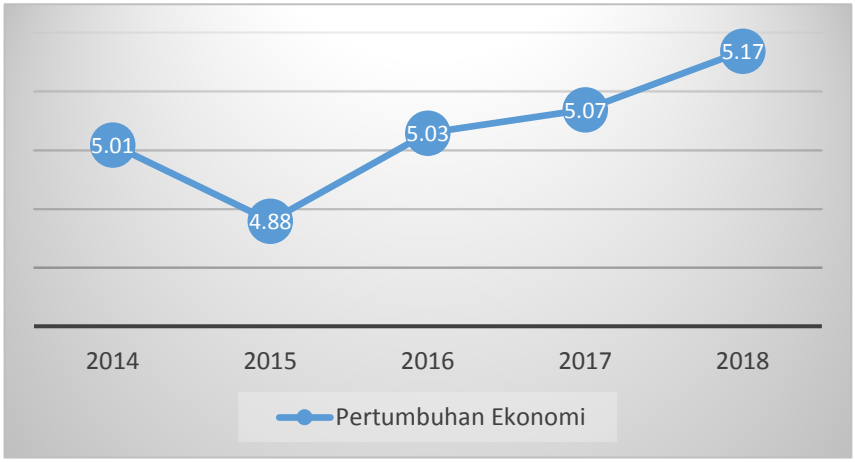

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah), 2019

Selama tahun 2014-2019, pertumbuhan ekonomi di Indonesia cenderung mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2018 sebesar 5,17% meningkat dibandingkan tahun 2014 yang sebesar 5,01%. Meskipun begitu, dibalik kenaikan pertumbuhan ekonomi tersebut, masih terdapat masalah didalamnya. Menurut Todaro (2000), laju pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis dapat menjawab segala persoalan perekonomian. Jika dilihat dari hasil penelitian dan data statistik, akan terlihat bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi telah berjalan dengan pesat, namun pertumbuhan yang pesat ini telah membawa akibat yang mengkhawatirkan, yaitu terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan yang lebih buruk (Wahyuni, Sukarsa, dan Yuliarmi, 2014).

Dalam gambar 1.2, terlihat bahwa distribusi PDRB per provinsi tahun 2018, sebagian besar distribusi PDRB didominasi oleh provinsi di Kawasan Barat Indonesia. Sementara, sumbangan yang berasal dari Kawasan Timur Indonesia cenderung sangat kecil bila dibandingkan dengan Kawasan Barat Indonesia. Distribusi PDRB terbesar diperoleh dari Provinsi di Kawasan Barat Indonesia, yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Sedangkan, distribusi PDRB terendah berasal dari provinsi di Kawasan Timur Indonesia, yaitu Maluku, Gorontalo, dan Maluku Utara. Ketimpangan distribusi PDRB antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia ini sangat terlihat jelas dalam gambar 1.2. Hal ini membuktikan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan, namun hal tersebut lantas tidak dapat menjawab segala persoalan perekonomian.

Gambar 1. 2 **Distribusi PDRB atas Dasar Harga Konstan Per Provinsi Tahun 2018**

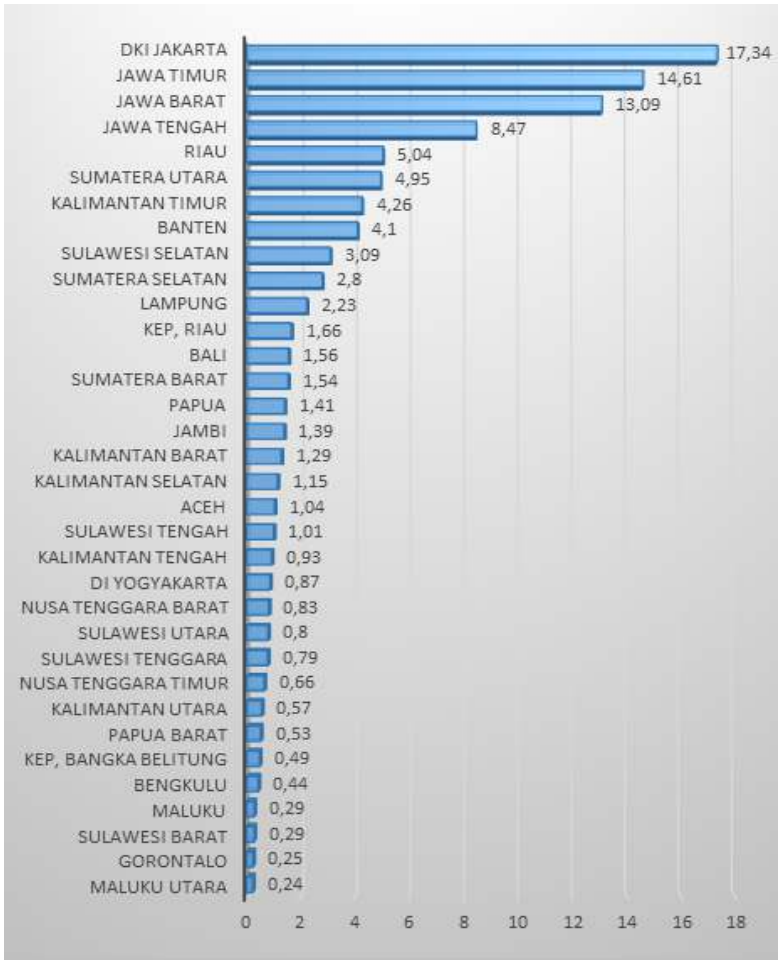

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

Dalam gambar 1.3 memperlihatkan indeks williamson rata-rata nasional tahun 2014-2018. Pada tahun 2014-2017, Indeks Williamson rata-rata nasional cenderung mengalami penurunan, dari 0,759 pada tahun 2014 menjadi 0,668 pada tahun 2017. Tetapi, pada tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar 0,042 dari Indeks Williamson tahun 2017 yang sebesar 0,668. Peningkatan ini mengartikan bahwa kesenjangan pendapatan antar daerah pun semakin melebar.

Gambar 1. 3 **Indeks Williamson Rata-Rata Nasional Tahun 2014-2018**

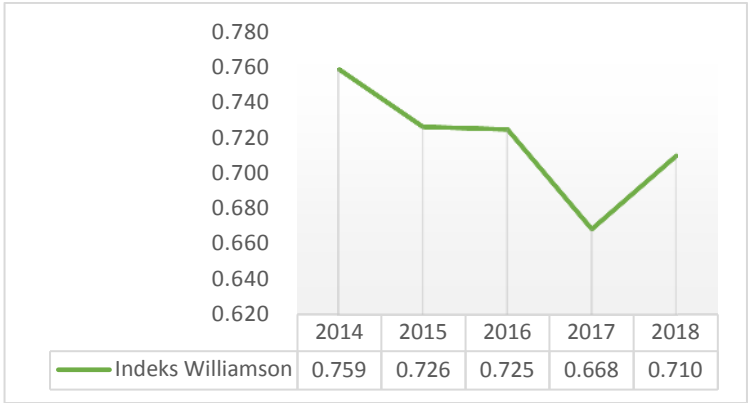

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2019

Bagaimanapun juga, permasalahan ini merupakan masalah yang cukup serius. Padahal, pemerintah pusat telah memberikan hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber penerimaan daerahnya sendiri. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengoptimalkan potensi pendanaan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Selain itu, karena setiap daerah mempunyai kemampuan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan operasional di daerahnya masing–masing, sehingga menimbulkan ketimpangan pendapatan antar daerah, maka untuk mengatasi ketimpangan tersebut pemerintah pusat mentransfer dana perimbangan untuk masing–masing daerah. Penerimaan-penerimaan inilah yang digunakan pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan ekonomi di daerahnya. Meskipun begitu, pemerintah daerah tidak boleh terlalu bergantung terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Jika pemerintah daerah memiliki ketergantungan keuangan yang tinggi, hal ini mengindikasikan bahwa kemandirian keuangan daerah yang rendah.

Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh Derajat Desentralisasi Fiskal. Derajat Desentralisasi Fiskal dihitung berdasarkan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah. Rasio derajat desentralisasi fiskal menggambarkan besarnya campur tangan pemerintah pusat dalam pembangunan daerah yang menunjukan tingkat kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Semakin tinggi rasio derajat desentralisasi fiskal, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan daerah dalam mendukung otonomi daerah (Halim, 2007).

Gambar 1. 4 **Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Nasional Tahun 2018**

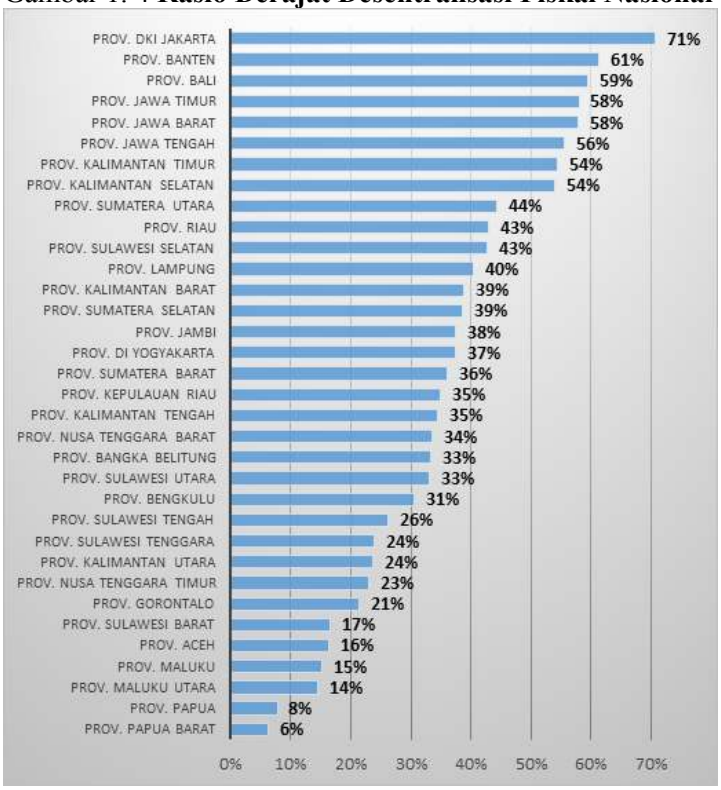

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (diolah), 2019

Dalam gambar 1.4, rata-rata daerah baik di Kawasan Timur Indonesia maupun Kawasan Barat Indonesia memiliki tingkat kemandirian keuangan yang rendah. Hal ini terlihat dari rasio derajat desentralisasi fiskal tahun 2018 yang rata-rata nilainya di bawah 50%. Tetapi, jika dibandingkan rasio derajat desentralisasi fiskal antara daerah di Kawasan

Timur Indonesia dan daerah di Kawasan Barat Indonesia, terlihat jelas bahwa daerah di Kawasan Timur Indonesia memiliki rasio derajat desentralisasi fiskal yang sangat rendah. Terutama pada provinsi Papua Barat dan Papua yang memiliki nilai derajat desentralisasi fiskal di bawah 10%. Sehingga, hal ini mengartikan bahwa rata-rata daerah di Indonesia cenderung memiliki tingkat kemandirian fiskal yang rendah, khususnya daerah di Kawasan Timur Indonesia.

Gambar 1. 5 **Penerimaan Daerah Tahun 2018**

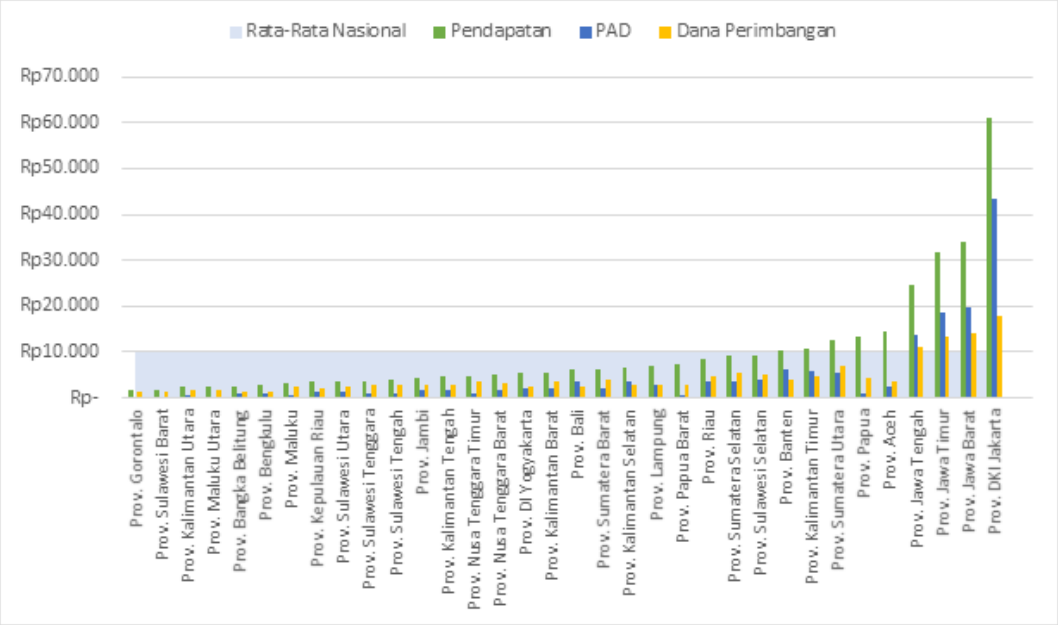

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2019

Dilihat dari gambar 1.5, daerah yang memiliki pendapatan di atas rata-rata nasional sebagian besar didominasi oleh Kawasan Barat Indonesia. Sedangkan, masih terdapat banyak daerah, khususnya di Kawasan Timur Indonesia, yang memiliki pendapatan di bawah rata-rata nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar daerah masih memiliki ukuran ekonomi yang kecil, sehingga hanya mampu memperoleh pendapatan di bawah rata-rata nasional. Berdasarkan pendapatan daerah inipun terlihat kesenjangan yang begitu tinggi antara daerah di Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia. Selain itu, meskipun daerah diberikan wewenang yang luas untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri dalam arti menggali dan mengelola pendapatan daerah guna membiayai pengeluaran daerahnya, ternyata rata-rata daerah hanya mampu memperoleh Pendapatan Asli Daerah yang sangat sedikit bila dibandingkan dengan Dana Perimbangan.

Mengingat besarnya dukungan pendanaan dalam pengelolaan anggaran untuk melaksanakan kewenangan yang telah diberikan kepada daerah, maka besarnya sumber pendanaan dari pemerintah pusat harus digunakan sesuai kebutuhan dan prioritas daerah. Sehingga, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik akan lebih efisien dan efektif. Dengan demikian, keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan ekonomi daerah tergantung pada pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanjanya. Karena alokasi belanja pemerintah erat kaitannya dengan pembangunan ekonomi yang terjadi di pusat maupun di daerah. Oleh karena itu, alokasi belanja pemerintah melalui belanja langsung maupun belanja tidak langsung untuk pembangunan ekonomi akan mempengaruhi seberapa besar pertumbuhan ekonomi. Seperti halnya dalam penelitian Haryanto (2013) yang menyebutkan bahwa belanja tidak langsung dan belanja langsung berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Gambar 1. 6 **Rasio Belanja Daerah Nasional Tahun 2018**

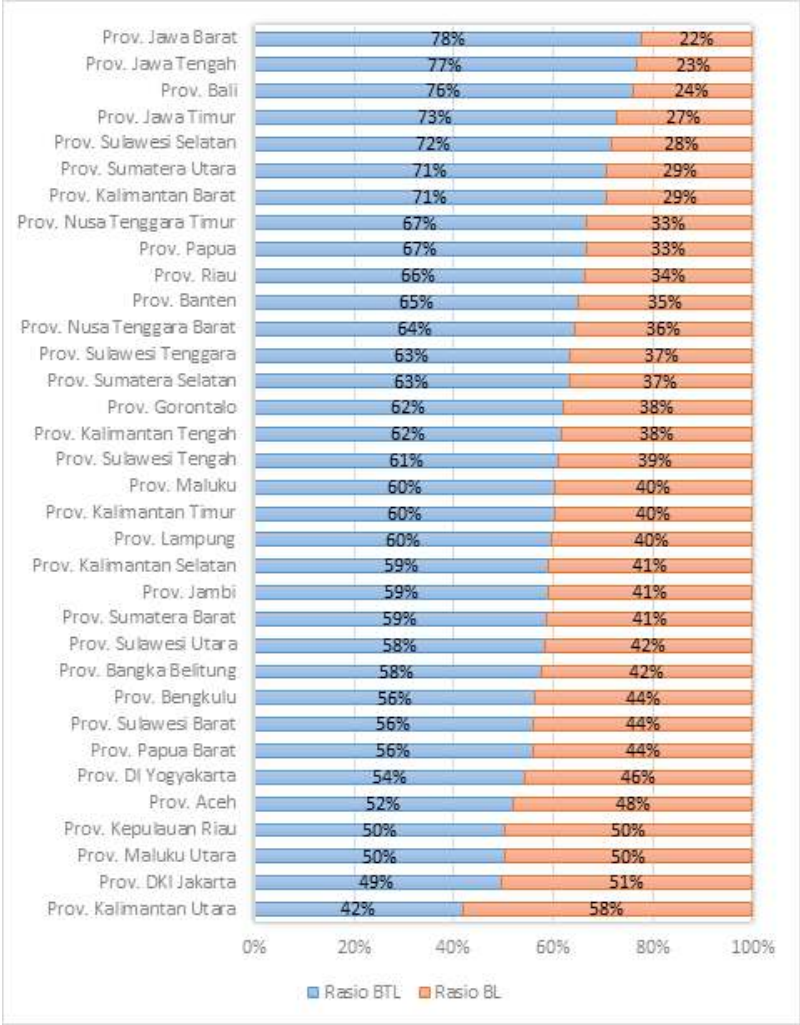

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (diolah), 2019

Gambar 1.6 menunjukkan bahwa sebagian besar daerah masih menggunakan penerimaannya untuk Belanja Tidak Langsung. Rata-rata daerah memiliki nilai Belanja Tidak Langsung di atas 50%. Penggunaan belanja yang tidak maksimal ini akan berdampak pada pembangunan perekonomian daerah yang menjadi tidak maksimal. Hal ini karena pengelolaan keuangan daerah sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat, jika pengelolaannya sesuai dengan kondisi yang dihadapi maka dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Ariza, 2016).

Dengan demikian keberhasilan suatu daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanjanya pada program dan kegiatan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat (kepentingan publik), sehingga diharapkan *local government spending* tersebut akan benar-benar bermanfaat dan menjadi stimulus fiskal bagi pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, harapan tersebut belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Hal ini terlihat dari PDRB (gambar 1.2) sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi regional, di mana setelah pelaksanaan desentralisasi fiskal pertumbuhan, PDRB menunjukkan variasi antar daerah yang masih relatif tinggi, khususnya di Kawasan Timur Indonesia dan Kawasan Barat Indonesia. Hal tersebut memperlihatkan indikasi awal bahwa implementasi desentralisasi fiskal memberikan dampak yang bervariatif terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

Dalam penelitian Rustan (2013) yang bertujuan untuk menguji pengaruh desentralisasi fiskal dan otonomi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama periode 1994-2010. Penelitiannya menggunakan indikator desentralisasi fiskal berupa indikator rasio pengeluaran, rasio pendapatan, dan rasio pendapatan asli daerah. Sedangkan, otonomi daerah diperlakukan sebagai *dummy* variabel dengan acuan tahun 2004 sebagai tahun dasar. Penelitian tersebut menggunakan analisis data panel dan *Hodric-Prescott (HP) filter*. Hasil analisisnya menyebutkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, terutama dari sisi pendapatan dan sisi peningkatan pendapatan asli daerah. Berdasarkan hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa desentralisasi fiskal mempunyai berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini pun didukung dalam penelitian Aulia (2014) yang menyebutkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi.

Tetapi, ada beberapa dari penelitian yang memiliki hasil yang berbeda, seperti dalam penelitian Saputra (2013). Dalam penelitian tersebut menggunakan metode analisis *Struktural Equation Modelling (SEM)* dan mendapat kesimpulan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini sejalan dengan penelitian Davodi dan Zao (1998), Philips dan Woller (1997) dalam (Saputra & Mahmudi, 2012) yang berpendapat bahwa desentralisasi fiskal akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi untuk kasus di negara berkembang, karena desentralisasi fiskal dapat mendorong ketidakstabilan ekonomi makro yang selanjutnya akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena desentralisasi fiskal dapat mengurangi pengeluaran pemerintah dan pajak milik pemerintah pusat yang seharusnya digunakan untuk menjalankan fungsi stabilitas.

Berdasarkan fenomena dalam latar belakang di atas, penulis ingin melakukan penelitian dengan topik **"ANALISIS PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KESENJANGAN FISKAL REGIONAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI"**. Penelitian ini menggunakan studi kasus perbandingan pengaruh desentralisasi fiskal di Kawasan Indonesia Timur dan Kawasan Indonesia Barat dengan rentang tahun 2001-2018.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Desentralisasi Fiskal

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2014, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Menurut Sidik (2002), desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai tujuan negara, terutama untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dan pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Desentralisasi memungkinkan pemerintah daerah untuk mengolah potensi daerahnya masing-masing. Selain itu, pemerintah daerah dapat langsung berbicara kepada rakyat mengenai permasalahan yang ada di daerahnya dan juga kebutuhan masyarakat yang perlu dipenuhi. Hal ini bertujuan agar dalam pelaksanaan pemerintahan bisa dilaksanakan dengan efektif dan efisien, dan juga bisa tepat sasaran terhadap kesejahteraan masyarakat.

Secara umum, konsep desentralisasi terdiri atas Desentralisasi Politik, Desentralisasi Administratif, Desentralisasi Fiksal, dan Desentralisasi Ekonomi (Sidik, 2002). Desentralisasi fiskal didefinisikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan yang dilimpahkan (Khusaini, 2006) dalam (Zulyanto, 2010). Dalam pelaksanaannya, desentralisasi fiskal menerapkan prinsip *money follow function*. Menurut Zulyanto (2010), *money follow function* berarti bahwa penyerahan tugas dan wewenang kepemerintahan disertai juga dengan pemberian wewenang untuk mengatur penerimaan dan pengeluarannya. Berdasarkan pembagian kewenangan dalam hal

pengeluaran, pemerintah daerah dalam melaksanakan pemerintahannya dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) sesuai dengan urusannya masing-masing. Selain itu, dalam hal penerimaan, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak dan menerima dana dari pusat berupa dana perimbangan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Ebel dan Yilmaz (2002), ada dua keuntungan yang dapat dicapai dari penerapan desentralisasi fiskal, antara lain: efisiensi dan alokasi sumber-sumber ekonomi; dan persaingan antar pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal memungkinan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi daerah karena memperoleh informasi yang lebih baik dibandingkan pemerintah pusat. Oleh karena itu, pengeluaran pemerintah daerah lebih mampu merefleksikan kebutuhan atau pilihan masyarakat di wilayah tersebut. Selain itu, dengan adanya desentralisasi fiskal akan mendorong pemerintah daerah untuk saling berkompetisi dalam menyediakan fasilitas publik yang lebih baik. Karena daerah yang memiliki fasilitas publik yang baik tentunya akan lebih disenangi masyarakat dibandingkan daerah yang memiliki fasilitas publik yang buruk.

Menurut Madiasmo (2002), ada beberapa referensi yang digunakan untuk mengukur kemandirian keuangan daerah, yaitu: (i) rasio kemandirian keuangan daerah menjelaskan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana luar atau eksternal; (ii) kemampuan keuangan daerah, bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kondisi keuangan dapat mendukung otonomi daerah; (iii) rasio efektivitas, bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan pemerintah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan sesuai dengan yang ditargetkan; dan (iv) derajat desentralisasi fiskal, menunjukkan seberapa besar kemandirian fiskal suatu daerah yang dihitung berdasarkan rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Penerimaan Daerah.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kemampuan negara jangka panjang dalam memproduksi berbagai jenis barang untuk penduduknya (Kuznet dalam Zulyanto (2010). Sedangkan, menurut Sukirno dalam Rustiono (2008), mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan produksi barang dan jasa dalam masyarakat semakin bertambah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dari pengertian ini, pertumbuhan ekonomi direfleksikan oleh pertumbuhan Domestik Regional Bruto (PDB). Produk Domestik Bruto dapat dipandang dalam dua hal, yaitu sebagai total penerimaan yang diterima oleh setiap orang dalam perekonomian di suatu negara dan total pengeluaran atas produk barang dan jasa dalam perekonomian di suatu negara (Mankiw, 2003).

Menurut Smith terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk (Arsyad,1999). Unsur pokok faktor produksi suatu negara ada tiga yang meliputi: (i) sumber daya alam; (ii) sumber daya insani; dan (iii) stok modal.

Teori neo klasik didasarkan sepenuhnya pada sisi penawaran berbeda dengan teori Harrod Domar yang menyatukan aspek permintaan dan penawaran dalam jangka panjang. Model pertumbuhan ekonomi neo-klasik atau yang biasa disebut sebagai model pertumbuhan Solow dalam pengembangan pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat pada akumulasi modal dan pertumbuhan penduduk tetapi dalam model ini juga menitik pusatkan pada kemajuan teknologi. Model pertumbuhan neo klasik Solow interaksi dari ketiga faktor produksi tersebut dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut:

$\Delta Y = f(\Delta K, \Delta L, \Delta T)$ ..... (1)

Tujuan dari persamaan diatas yaitu memperlihatkan faktor produksi yang meliputi pertumbuhan persediaan modal, angkatan kerja, serta kemajuan teknologi yang saling berinteraksi dalam suatu perekonomian, selain itu melihat bagaimana pengaruh yang

diberikan terhadap output barang dan jasa suatu negara secara keseluruhan (Mankiw, 2003).

Dalam buku yang berjudul *The General Theory of Employment, Interest, and Money* yang ditulis oleh Keynes menyebutkan bahwa perekonomian tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar (Pujiati, 2004). Namun, diperlukan peran pemerintah dalam sistem perekonomian. Hal ini karena dalam situasi makro suatu perekonomian ditentukan oleh apa yang terjadi dengan permintaan agregat masyarakat. Apabila permintaan agregat melebihi penawaran agregat, maka akan terjadi "kekurangan produksi". Sehingga, akan menyebabkan kenaikan harga. Sementara, apabila permintaan agregat lebih kecil daripada penawaran agregat, maka akan "kelebihan produksi". Akibatnya akan terjadi penurunan harga. Oleh karena itu, dalam teori keynesian, pemerintah perlu memengaruhi permintaan agregat dengan menggunakan kebijakan makro agar kondisi perekonomian bisa mendekati posisi *full employment*.

Permintaan agregat adalah keseluruhan jumlah uang yang dibelanjakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk membeli barang dan jasa dalam periode tertentu. Dalam perekonomian tertutup, permintaan agregat terdiri dari tiga unsur, yaitu: (i) Pengeluaran konsumsi oleh rumah tangga (C); (ii) Pengeluaran investasi oleh perusahaan (I); dan (iii) Pengeluaran pemerintah (G). Apabila dirumuskan adalah sebagai berikut:

$Y = C + I + G$ .....(2)

Masing-masing unsur permintaan agregat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berbeda. Pengeluaran konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan yang diterima oleh rumah tangga dan kecenderungan berkonsumsinya. Pengeluaran investasi dipengaruhi oleh keuntungan yang diharapkan dan biaya dana. Dan pengeluaran pemerintah dipengaruhi oleh proses politik yang kompleks.

Disparitas Pendapatan Regional

Disparitas pendapatan regional merupakan perbedaan kemakmuran ekonomi antara wilayah yang kaya dengan yang miskin. Perbedaan kemakmuran ini tercermin dari adanya perbedaan pendapatan (Baldwin, 1989). Disparitas pendapatan regional merupakan hal yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan sumber daya alam, serta perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing daerah. Sehingga, dari adanya perbedaan ini menyebabkan tingkat pembangunan dan distribusi pendapatan di setiap daerah berbeda-beda. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan ini, muncul istilah daerah maju dan daerah terbelakang (Sjafrizal, 2012).

Kuznets (1955) dalam Isnowati (2007), mengemukakan suatu hipotesis yang disebut "*U-hypothesis"*. Hipotesa ini menyebutkan bahwa pada tahap awal pembangunan, distribusi pendapatan akan semakin tidak merata. Namun, setelah mencapai titik pembangunan tertentu, distribusi pandapatan akan semakin merata. Hal ini disebabkan karena pada awal proses pembangunan, ketimpangan distribusi pendapatan meningkat karena proses urbanisasi dan industrialisasi. Sementara, pada akhir proses pembangunan, ketimpangan pendapatan akan mengalami penurunan, yaitu pada saat sektor-sektor ekonomi di daerah perkotaan sudah mampu menyerap sebagian besar tenaga kerja yang berasal dari pedesaan.

Disparitas pendapatan regional dapat dianalisis dengan menggunakan Indeks Williamson. Indeks Williamson merupakan ukuran disparitas pendapatan antar daerah yang pertama kali dikembangkan oleh Jeffrey G. Williamson. Indeks Williamson mengukur dispersi tingkat pendapatan perkapita daerah relatif terhadap rata-rata pendapatan nasional.

$$C_w = \frac{\sqrt{\Sigma(Y_i - \bar{y})^2 f_i / n}}{\bar{y}} \quad \text{..... (3)}$$

Di mana Y_i menunjukkan PDRB per kapita di daerah i, ȳ adalah rata-rata PDRB perkapita daerah. Sedangkan, f_i menunjukkan jumlah penduduk di daerah i dan n menunjukkan jumlah penduduk daerah secara keseluruhan. Menurut Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, kriteria Indeks Williamson adalah: disparitas rendah apabila nilai Indeks Williamson kurang dari 0,5; dan disparitas tinggi apabila Indeks Williamson lebih dari 0,5.

Kerangka Pemikiran

Pada kerangka pemikiran memberikan penjelasan singkat mengenai kerangka pikir yang dibuat, serta variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Otonomi daerah dan desentralisasi telah dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang mengatur tentang perimbangan wewenang dan perimbangan otoritas keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Dengan adanya undang-undang tersebut pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah terjadi di Indonesia mulai dari bagian barat sampai timur. Salah satu bentuk kewenangannya adalah dalam hal mengatur urusan keuangannya sendiri atau yang disebut dengan desentralisasi fiskal.

Gambar 2. 1 **Kerangka Pemikiran**

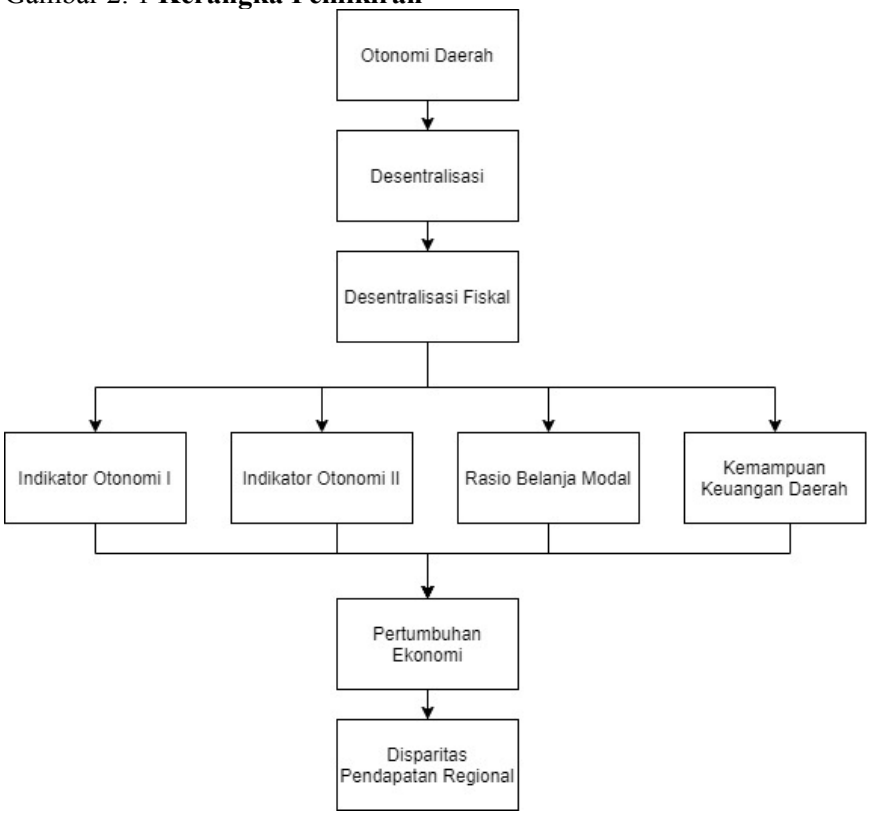

Sumber: Peneliti, 2019

Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara dari sebuah rumusan masalah, oleh sebab itu adapun hipotesis yang dapat di susun ialah desentralisasi fiskal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, serta terhadap disparitas pendapatan regional melalui pertumbuhan ekonomi.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Subana dan Sudrajat (2005) menjelaskan bahwa jenis kuantitatif dapat dilihat dari segi tujuan dari penelitian yang digunakan, yaitu diantaranya digunakan untuk menguji suatu teori, menyajikan suatu fakta atau mendeskpritifkan statistik, dan untuk menunjukkan hubungan antar variabel dalam penelitian. Serta, adapula yang sifatnya untuk mengembangkan suatu konsep, mengembangkan pemahaman, atau mendeskripsikan banyak hal. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan disparitas regional pada 29 Provinsi di Indonesia dengan cara menguji hubungan antar variabel. Serta, dianalisis dengan menggunakan bantuan aplikasi Eviews 10.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berbentuk data panel dari 29 Provinsi di Indonesia dalam periode waktu 19 tahun setelah diterapkannya otonomi dan desentralisasi fiskal di Indonesia tahun 2001 hingga tahun 2018.
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diantaranya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Proyeksi Jumlah Penduduk per Provinsi, PDRB per kapita daerah, dan Indeks Williamson. Data yang terkumpul bersumber dari Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel merupakan suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti serta memberikan suatu informasi yang diperlukan guna mengetahui cara mengukur suatu variabel. Berikut merupakan definisi operasional masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

1. *Pertumbuhan Ekonomi (Y1):* Pertumbuhan ekonomi merupakan jumlah Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) di setiap provinsi yang diukur berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan.
2. *Disparitas Pendapatan Regional (Y2):* Disparitas pendapatan regional merupakan perbedaan kemakmuran ekonomi yang tercermin dari perbedaan keuangan antar daerah. Variabel ini diukur dengan Indeks Williamson.
3. *Indikator Otonomi I (X1):* Indikator otonomi I merupakan ukuran kemampuan pendapatan asli daerah dalam kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel ini diukur dengan perbandingan pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah.
4. *Indikator Otonomi II (X2):* Indikator Otonomi II merupakan ukuran kemampuan daerah dari transfer dalam penciptaan pertumbuhan ekonomi. Variabel ini diukur dengan perbandingan pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah tanpa transfer pemerintah pusat.
5. *Rasio Belanja Modal (X3):* Rasio belanja modal merupakan ukuran kemampuan daerah dalam pelaksanaan belanja modal daerah terkait dengan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Variabel ini diukur dengan perbandingan total belanja modal terhadap total belanja daerah.
6. *Kemampuan Keuangan Daerah (X4):* Kemampuan keuangan daerah merupakan ukuran seberapa besar penerimaan daerah dapat memenuhi belanja daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Variabel ini diukur dengan perbandingan total penerimaan daerah terhadap total belanja daerah.

7. *Jumlah Penduduk (X5):* Jumlah penduduk merupakan total penduduk yang berada di provinsi bersangkutan.
8. *Dummy (D1): Dummy* merupakan pengkategorian wilayah antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia. Nilai 1 = Kawasan Barat Indonesia dan nilai 0 = Kawasan Timur Indonesia.

Metode Analisis

Dalam penelitian ini, model penelitian yang digunakan adalah model regresi data panel. Penelitian ini mencari tahu bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan disparitas pendapatan regional di Kawasan Timur Indonesia dan Kawasan Barat Indonesia. Sehingga, untuk membedakan Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia akan digunakan dummy. Kemudian, metode analisis data yang digunakan adalah analisis jalur. Metode ini digunakan untuk menganalisis pengaruh langsung maupun tidak langsung variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengaruh dalam jalur tersebut ditunjukkan melalui koefisien jalur pada setiap diagram jalur dari hubungan kasual antar variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat dua persamaan awal, yaitu sebagai berikut:

(1) $LogY_1 = \beta_0 + \beta_1 LogX_1 + \beta_2 LogX_2 + \beta_3 LogX_3 + \beta_4 LogX_4 + \beta_5 LogX_5 + \beta_6 D_1 + \varepsilon$

(2) $Y_2 = \beta_0 + \beta_1 LogY_1 + \beta_2 LogX_1 + \beta_3 LogX_2 + \beta_4 LogX_3 + \beta_5 LogX_4 + \beta_6 LogX_5 + \beta_7 D_1 + + \varepsilon$

Dimana, Y_1 adalah pertumbuhan ekonomi; Y_2 adalah disparitas pendapatan regional; X_1 adalah indikator otonomi I; X_2 adalah indikator otonomi II; X_3adalah rasio belanja modal; X_4 adalah kemampuan keuangan daerah; X_5 adalah jumlah penduduk; D_1 adalah variabel dummy kawasan Indonesia; dan ε adalah ariabel pengganggu.

D. PEMBAHASAN

Secara geografis, Indonesia terletak antara 5˚54’ 09” BU hingga 11˚ 08’ 20” BS dan 95˚ 00’ 38” sampai 141˚ 01’ 12” BT. Indonesia terletak di antara Benua Asia dan Benua Australia, serta di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau lebih dari 17.000 pulau. Indonesia memiliki luas daerah sebesar 1.910.931,32 km2. Indonesia terdiri dari 81.626 desa, 7.024 kecamatan, 98 kota, dan 34 provinsi yang terletak di 5 pulau besar dan 4 kepulauan.

Pertumbuhan ekonomi per provinsi yang dilihat dari Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2010 per provinsi tahun 2001-2018 menunjukkan bahwa rata-rata daerah mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi. Adapun daerah dengan pertumbuhan ekonomi terbesar yaitu Provinsi DKI Jakarta dan yang terendah merupakan Provinsi Maluku Utara. Tetapi, dapat dilihat pula bahwa terjadi ketimpangan pendapatan antardaerah yang cukup besar. Dalam hal ini ketimpangan yang terjadi adalah antara daerah di Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia. Meskipun Kawasan Timur Indonesia menunjukkan tren yang positif, tetapi pencapaian tersebut belum mampu mendekati capaian pembangunan di Kawasan Barat Indonesia.

Hasil Analisis Jalur

Model analisis jalur dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 4.5 sebagai berikut:

Gambar 4. 1 **Model Analisis Jalur**

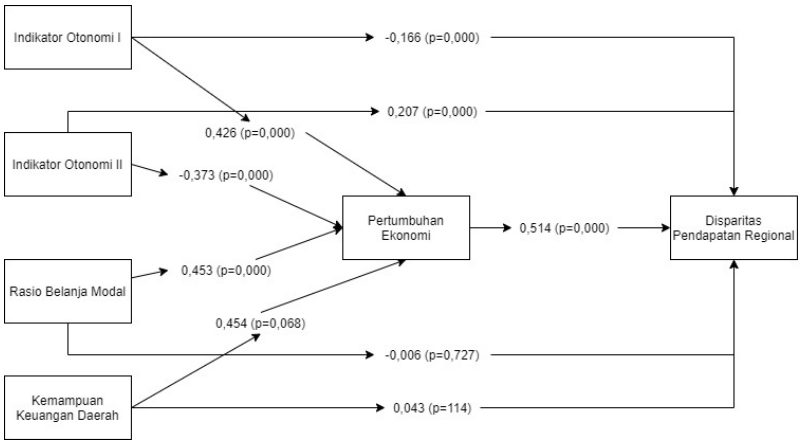

Sumber: Peneliti, 2020

Berdasarkan gambar di atas, didapatkan model persamaan sebagai berikut:

(1) $LogY_1 = \beta_0 + \beta_1 LogX_1 + \beta_2 LogX_2 + \beta_3 LogX_3 + \beta_4 LogX_4 + \beta_5 LogX_5 + \beta_6 D_1 + \varepsilon$

(2) $Y_2 = \beta_0 + \beta_1 LogY_1 + \beta_2 LogX_1 + \beta_3 LogX_2 + \beta_4 LogX_3 + \beta_5 LogX_4 + \beta_6 LogX_5 + \beta_7 D_1 + \varepsilon$

Dalam tabel 4.1 diketahui bahwa terdapat pengaruh langsung variabel indikator otonomi I (X), indikator otonomi II (X2), dan rasio belanja modal (X3) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y1) masing-masing sebesar 0,426890, -0,373714, dan 0,453452 dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil daripada tingkat signifikansi 5 persen. Selain itu, juga terdapat pengaruh langsung variabel kemampuan keuangan daerah (X4) secara tidak signifikan terhadap pertumbuhan Ekonomi (Y1) sebesar 0,454564 dengan nilai signifikansi 0,0680 lebih besar dari tingkat signifikansi 5 persen.

Diketahui terdapat pengaruh langsung pertumbuhan ekonomi (Y1) secara signifikan terhadap disparitas pendapatan regional (Y2) sebesar 0,514988 dengan nilai signifikansi 0,0000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 5 persen. Pengaruh langsung secara signifikan lainnya terlihat pada variabel indikator otonomi I dan indikator otonomi II terhadap disparitas pendapatan regional (Y2) sebesar -0,166188 dan 0,207522 dengan nilai signifikansi 0,0000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 5 persen. Selain itu, adapula pengaruh langsung secara tidak signifikan pada variabel rasio belanja modal (X3) dan kemampuan keuangan daerah (X4) terhadap disparitas pendapatan regional (Y2) sebesar -0,006715 dan 0,043700 dengan nilai signifikansi masing-masing sebesar 0,7273 dan 0,5833.

Adapun pengaruh tidak langsung indikator otonomi I (X1), indikator otonomi II (X2), rasio belanja modal (X3), dan kemampuan keuangan daerah (X4) terhadap disparitas pendapatan regional (Y2) melalui pertumbuhan ekonomi (Y1). Hal ini dilihat dari hasil kali pengaruh langsung indikator otonomi I (X1), indikator otonomi II (X2), rasio belanja modal (X3), dan kemampuan keuangan daerah (X4) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y1) dan pengaruh langsung pertumbuhan ekonomi (Y1) terhadap disparitas pendapatan regional (Y2). Sehingga diperoleh pengaruh tidak langsung masing-masing sebesar 0,219843, -0,192246, 0,233522, dan 0,234095. Hasil pengaruh tidak langsung tersebut lebih besar dari hasil pengaruh langsung indikator otonomi I (X1), rasio belanja modal (X3), dan kemampuan keuangan daerah (X4) terhadap disparitas pendapatan regional (Y2) yang masing-masing sebesar -0,166188, -0,006715, dan 0,043700. Hal ini mengartikan bahwa pertumbuhan ekonomi (Y1) memediasi hubungan indikator otonomi I (X1), rasio belanja

modal (X3), dan kemampuan keuangan daerah (X4) terhadap disparitas pendapatan regional (Y2).

Pengaruh Indikator Otonomi I Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil regresi menerangkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel indikator otonomi I terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien sebesar 4,748 dengan signifikansi t sebesar 0,0000. Hasil ini mengartikan bahwa Semakin tinggi rasio indikator otonomi I, maka pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat.

Sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini bahwa indikator otonomi I memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil yang sama diperoleh dalam penelitian Kusuma (2016) yang menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah mampu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui kemampuan pemerintah daerah dalam membelanjakan pengeluarannya. Kemampuan pendapatan asli daerah pun dapat dijadikan representasi keberhasilan penerapan desentralisasi di Indonesia. Penelitian Apriesa dan Miyasto (2013) pun mendapatkan hasil yang sama. Dalam penelitiannya menyebutkan bahwa derajat desentralisasi fiskal (indikator otonomi I) merupakan hitungan dari penerimaan daerah. Penerimaan daerah yang ada digunakan sebagai sumber pengeluaran untuk pembangunan daerah terutama dalam penyediaan pelayanan publik. Sehingga, derajat desentralisasi fiskal yang merupakan penerimaan dan sebagai sumber pengeluaran juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Indikator Otonomi II Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil pengujian path analysis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh langsung yang negatif dan signifikan variabel indikator otonomi II terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien jalur sebesar -4,513 dan signifikansi t sebesar 0,0000. Hasil ini mengartikan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah tanpa adanya transfer dari pemerintah daerah akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Hasil ini berbeda dengan tujuan dalam penelitian ini yang menduga bahwa indikator otonomi II berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil yang berbeda didapatkan dalam penelitian Kusuma (2016) yang menyebutkan bahwa setiap peningkatan dari penerimaan dengan tidak menyertakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah akan direspon dengan pertumbuhan ekonomi yang positif.

Pengaruh Rasio Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil pengujian menerangkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan variabel rasio belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai koefisien sebesar 7,998 dan signifikansi t sebesar 0,0000. Sehingga, dalam penelitian ini menerima hipotesis alternatif. Hasil ini mengartikan bahwa semakin tinggi rasio belanja modal, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini memiliki hasil yang sama dengan penelitian Kusuma (2016) yang menyebutkan bahwa rasio belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Kemampuan Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kemampuan keuangan daerah memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sehingga, dapat diartikan bahwa semakin tinggi kemampuan keuangan daerah, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi peningkatannya tidak terjadi secara signifikan.

Dalam penelitian Sianturi (2011) menyebutkan bahwa peningkatan penerimaan akan meningkatkan pengeluaran pemerintah daerah untuk pelayanan publik. Sehingga akan mendorong peningkatan pendapatan per kapita masyarakat yang merupakan indikator dari

pertumbuhan ekonomi daerah. Meskipun begitu, dalam hasil penelitian ini, peningkatan penerimaan daerah memang mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi hasilnya tidak signifikan. Maka, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dengan tujuan penelitian yang mengasumsikan bahwa peningkatan dalam kemampuan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Variabel *Dummy* Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil regresi didapatkan hasil bahwa variabel dummy memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai koefisien variabel dummy sebesar 1,268 dengan nilai signifikansi sebesar 0,205. Hasil ini mengartikan bahwa tidak ada pengaruh antara pertumbuhan ekonomi dengan perbedaan kawasan baik Kawasan Barat Indonesia maupun Kawasan Timur Indonesia. Sejak diberlakukannya desentralisasi, pertumbuhan ekonomi di Kawasan Barat Indonesia tetap lebih tinggi dibandingkan dengan Kawasan Timur Indonesia.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Disparitas Pendapatan Regional

Hasil pengujian path analysis menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap disparitas pendapatan regional. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai koefisien sebesar 35,636 dan nilai signifikansi t sebesar 0,0000. Hasil ini mengartikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang meningkat juga akan meningkatkan disparitas pendapatan antar daerah.

Hasil ini tidak sesuai dengan tujuan penelitian yang seharusnya mendapat hasil bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap disparitas pendapatan regional. Hasil yang sama terdapat pada penelitian Sianturi dan Miyasto (2011), yang menyebutkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi juga akan meningkatkan ketimpangan wilayah. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa rata-rata daerah di Indonesia masih dalam proses menuju steady state, dilihat dari pertumbuhan ekonomi daerah yang kian meningkat disertai dengan meningkatnya ketimpangan antar daerah.

Pengaruh Indikator Otonomi I Terhadap Disparitas Pendapatan Regional

Hasil regresi menunjukkan bahwa indikator otonomi I berpengaruh negatif dan signifikan terhadap disparitas pendapatan regional dengan nilai koefisien -5,661 dan nilai signifikansi t sebesar 0,0000. Hasil ini mengartikan bahwa peningkatan indikator otonomi I mampu menurunkan disparitas pendapatan antar daerah. Hal ini sesuai dengan pernyataan dalam penelitian Akai dan Sakata (2005) yang mengatakan bahwa desentralisasi fiskal merupakan alat yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi sektor publik dan untuk mengurangi kesenjangan antar daerah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian Sidig (2018) yang menyebutkan bahwa desentralisasi fiskal mampu mengurangi ketimpangan pendapatan antardaerah. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa indikator otonomi I sesuai dengan tujuan penelitian yang menyatakan bahwa indikator otonomi I berpengaruh negatif dan signifikan terhadap disparitas pendapatan regional.

Pengaruh Indikator Otonomi II Terhadap Disparitas Pendapatan Regional

Hasil pengujian analisis jalur menunjukkan bahwa variabel indikator otonomi II memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap disparitas pendapatan regional. Pengaruh ini dilihat dari nilai koefisien sebesar 7,692 dan nilai signifikansi t sebesar 0,0000. Hal ini mengartikan bahwa jika kemandirian keuangan daerah tanpa adanya transfer dari pemerintah pusat semakin tinggi, maka akan diikuti dengan peningkatan disparitas pendapatan antar daerah juga.

Hasil ini bertentangan dengan penelitian Akai dan Sakata (2005) yang menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah mampu untuk menurunkan tingkat disparitas pendapatan regional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika pemerintah pusat menghentikan dana transfernya kepada pemerintah daerah akan membuat disparitas pendapatan antardaerah semakin meningkat.

Pengaruh Rasio Belanja Modal Terhadap Disparitas Pendapatan Regional

Hasil pengujian memperoleh kesimpulan bahwa rasio belanja modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap disparitas pendapatan regional. Nilai koefisien yang didapatkan sebesar -0,348 dan nilai signifikansi t sebesar 0,727. Hasil ini mengartikan bahwa jika pemerintah memfokuskan belanja pada belanja modal dan nilainya selalu meningkat, maka akan mampu menurunkan disparitas pendapatan regional, tetapi perubahannya tidak signifikan. Penurunan yang tidak signifikan ini menunjukkan bahwa belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih belum optimal.

Penelitian sebelumnya Gulo dkk (2017) menjelaskan bahwa belanja langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan regional. Hasil dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian Nurman, tetapi pengaruh rasio belanja modal memang mampu menurunkan ketimpangan pendapatan antardaerah, tetapi penurunannya tidak signifikan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak sesuai dengan tujuan penelitian yang menyatakan bahwa rasio belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap disparitas pendapatan regional.

Pengaruh Kemampuan Keuangan Daerah Terhadap Disparitas Pendapatan Regional

Hasil pengujian memperoleh kesimpulan bahwa kemampuan keuangan daerah mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil pengujian path analysis diperoleh nilai koefisien sebesar 0,548 dan nilai signifikansi t sebesar 0,583. Hasil ini mengartikan bahwa kemampuan keuangan daerah yang semakin meningkat justru akan meningkatkan disparitas pendapatan regional.

Hasil ini tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini yang seharusnya kemampuan keuangan daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap disparitas pendapatan regional. Seperti dalam peneltiian Dyah (2012) yang menyebutkan bahwa ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mengelola penerimaan dan mengalokasikan belanja memiliki dampak terhadap kesenjangan pendapatan antardaerah yang semakin meningkat.

Pengaruh Variabel *Dummy* Terhadap Disparitas Pendapatan Regional

Hasil pengujian analisis jalur menunjukkan bahwa variabel dummy memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap disparitas pendapatan regional. Hasil ini ditunjukkan dengan nilai koefisien sebesar -1,582 dan nilai signfikansi t sebesar 0,114. Hal ini mengartikan bahwa tidak ada pengaruh antara perbedaan wilayah dengan disparitas pendapatan regional. Sehingga, pelaksanaan desentralisasi fiskal tidak mempengaruhi permasalahan ketimpangan yang terjadi di Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia, dimana ada ataupun tidaknya desentralisasi fiskal, ketimpangan yang terjadi di Kawasan Barat Indonesia tetap lebih besar dibandingkan ketimpangan yang terjadi di Kawasan Timur Indonesia.

Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Disparitas Pendapatan Regional melalui Pertumbuhan Ekonomi

Hasil pengujian analisis jalur menunjukkan bahwa terdapat pengaruh tidak langsung antara variabel indikator otonomi I, indikator otonomi II, rasio belanja modal, dan

kemampuan keuangan daerah terhadap disparitas pendapatan regional melalui pertumbuhan ekonomi. Pengaruh tidal langsung tersebut didapat dari hasil perkalian antara nilai koefisien masing-masing variabel indikator indikator otonomi I, indikator otonomi II, rasio belanja modal, dan kemampuan keuangan daerah terhadap disparitas pendapatan regional dan nilai koefisien pertumbuhan ekonomi terhadap disparitas pendapatan regional.

Variabel indikator otonomi I memiliki pengaruh terhadap disparitas pendapatan regional dengan nilai koefisien sebesar 0,426 dan nilai koefisien pertumbuhan ekonomi terhadap disparitas pendapatan regional sebesar 0,514. Sehingga didapatkan pengaruh tidak langsung indikator otonomi I terhadap disparitas pendapatan regional melalui pertumbuhan ekonomi sebesar 0,219.

Indikator otonomi II memiliki pengaruh tidak langsung terhadap disparitas pendapatan regional melalui pertumbuhan ekonomi sebesar 0,192. Dilihat dari nilai koefisien indikator otonomi II terhadap disparitas pendapatan regional sebesar -0,373 dan nilai koefisien pertumbuhan ekonomi terhadap disparitas pendapatan regional sebesar 0,514.

Kemudian, nilai koefisien variabel rasio belanja modal terhadap disparitas pendapatan regional sebesar 0,453 dan nilai koefisien pertumbuhan ekonomi terhadap disparitas pendapatan regional sebesar 0,514. Sehingga, nilai pengaruh tidak langsung rasio belanja modal terhadap disparitas pendapatan regional melalui pertumbuhan ekonomi sebesar 0,233.

Dan terakhir, pengaruh tidak langsung kemampuan keuangan daerah terhadap disparitas pendapatan regional sebesar 0,234. Hasil ini didapat dari perkalian antara nilai koefisien kemampuan keuangan daerah terhadap disparitas pendapatan regional sebesar 0,454 dan nilai koefisien pertumbuhan ekonomi terhadap disparitas pendapatan regional sebesar 0,514.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah disampaikan pada pemaparan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan perbedaan kawasan Indonesia tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini mengartikan bahwa sejak desentralisasi fiskal dilaksanakan pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia tidak mampu untuk mengimbangi pertumbuhan ekonomi di kawasan barat Indonesia. Hal yang sama pun terjadi pada disparitas pendapatan regional, dimana ketimpangan yang terjadi di kawasan barat Indonesia selalu lebih tinggi daripada ketimpangan di kawasan timur Indonesia. Padahal, desentralisasi fiskal bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pendapatan antardaerah.

Adapun penyebab permasalahan ini dikarenakan pemerintah daerah masih kurang optimal dalam mengelola sumber-sumber penerimaan daerah. Selain itu, pemerintah daerah pun masih belum maksimal dalam mengalokasikan belanja daerah.

Saran

Berdasarkan penelitian dan hasil analisis yang diperoleh, maka saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini yaitu pemerintah daerah perlu meningkatkan kemampuannya dalam mengelola potensi daerahnya. Daerah harus dapat membuat kebijakan sekaligus strategi yang tepat sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing untuk dapat mengoptimalkan instrumen PAD yang telah diatur oleh undang-undang. Keberhasilan tersebut harus didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas, anggaran yang cukup dan sistem kerja yang efektif dengan menerapkan teknologi informasi yang semakin canggih. Selain pentingnya perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan, diperlukan pula pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Pemerintah daerah pun perlu didorong untuk bekerja lebih efektif dan efisien dalam mengelola penerimaan daerahnya melalui peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang

semakin baik. Perbaikan jasa layanan dan peningkatan fasilitas publik akan membuat kesadaran wajib pajak meningkat dan secara langsung mendorong peningkatan kontribusi PAD terhadap APBD.

Selain itu, pemerintah daerah juga perlu lebih bijak dalam mengalokasikan belanjanya. Pemerintah daerah harus meningkatkan kualitas pengelolaan belanja daerah, dilakukan dengan fokus pembangunan pada program-program yang menjadi prioritas pemerintah daerah. Koordinasi antara pemerintah daerah kabupaten kota dan pemerintah provinsi harus ditingkatkan agar kebutuhan dan prioritas daerah dapat diwujudkan. Pemerintah daerah harus meningkatkan alokasi belanja yang lebih besar lagi bagi kepentingan publik serta meningkatkan kemampuan merealisasikan belanja tersebut dalam rangka pembangunan kepentingan publik. Pemerintah daerah pun perlu melakukan sosialisasi tentang kualitas belanja dan indikator-indikator capain yang mendukung pengelolaan belanja yang berkualitas bagi seluruh pelaksana kegiatan dan pimpinan SKPD.

DAFTAR PUSTAKA

Agusalim, Lestari. 2016. Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan dan Desentralisasi di Indonesia. KINERJA, Vol. 20, No. 1, Hal:53-68.

Akai dan Sakata. 2005. *Fiscal Decentralization, Commitment, and Regional Inquality: Evidance From State Level Cross-Sectional Data for The United State.* Osaka: Osaka International University.

Apriesa, L. F. dan Miyasto. 2013. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Ketimpangan Pendapatan.

Aritenang, A. F. 2010. *A Study on Indonesia Region Disparity: Post Decentralization.* CIRJE Discussion Paper, F-315.

Ariza, Anggatia. 2016. Pengaruh Kemampuan Keuangan dan Posisi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Kewirausahaan, Vol. 5, No.1, 24-45.

Arsyad, Lincoln. 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi. BPFE Yogyakarta.

Aulia, Nely. 2014. Hubungan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012.

Azwar, Saifuddin. 2007. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. 2016. https://www.bappenas.go.id/id/. Diakses pada tanggal 29 Februari 2020, pukul 20.06.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. 2018. https://www.bappenas.go.id/id/. Diakses pada tanggal 29 Februari 2020, pukul 20.10.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur. 2019. https://www.jatim.bps.go.id/. Diakses pada tangga 29 Februari 2020, pukul 20.15.

Deininger K dan Squire L. 1996. *Measuring Inequality: A New Data Base (Online)*. World Bank. (http://www.cid. harvard.edu/hiid/537.pdf, diakses tanggal 5 Februari 2016)

Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. 2019. https://www.djpk.kemenkeu.go.id/. Diakses pada tanggal 29 Februari 2020, pukul 20.16.

Dyah, S. M. 2012. *The Impact of Fiscal Decentralization on Income Inequality in Indonesia.* The Okuma School of Public Management, Waseda University.

Ebel dan Yilmaz. 2002. *Concept of Fiscal Decentralization and World Wide Overview.* World Bank Insitute Available: *www.worldbank.org*.

Gulo, Zamzam, dan Bhakti. 2017. Dampak Alokasi Belanja Langsung Terhadap Ketimpangan Ekonomi Wilayah (Studi Kasus Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jambi, dan Provinsi Bengkulu). Jurnal Paradigma Ekonometika Vol.12, No.2.

Habibah, S., Haryo Kuncoro, dan Karuniana Dianta. 2017. *Effect of Fiscal Dezentralization on Economic Growth of Regency/City in East Jawa 2010-2014.* Jurnal Ilmiah Econosains, Vol. 15, No. 2.

Halim, Abdul. 2007. Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Hanafiah, T. 1988. Pendekatan Wilayah dan Pembangunan Pedesaan. Bogor: IPB.

Haryanto, Tommy Prio. 2013. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011. Jurnal Ekonomi. Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.

Isnowati, Sri. 2007. Pengujian Hipotesis Kuznets di Wilayah Pembangunan Jawa Tengah. Jurnal Bisnis dan Ekonomi Vol. 14 No.1.

Kamaludin. 1998. Pengantar Ekonomi Pembangunan Dilengkapi dengan Analisis Beberapa Aspek Pembangunan Ekonomi Nasional. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

Kementerian Dalam Negeri. https://www.kemendagri.go.id/. Diakses pada tanggal 29 Februari 2020, pukul 20.06.

Koswara, E. 2005. Otonomi Daerah untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat. Jakarta: Yayasan Pariba.

Kusuma, Hendra. 2016. Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan, 9(1), 1-92.

Kuznets, Simon. 2005. *The American Economic Review, Vol. 45, No.1, pp. 1-28.*

Lessmann, Christian. 2006. *Fiscal Decentralization and Regional Disparity: A Panel Data Approach for OECD Countries.*

Mankiw, N. Gregory. 2003. Teori Makro Ekonomi Terjemahan, PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Mardiasmo, 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Muryawan, S. M. dan Sukarsa. 2016. Pengaruh Desentralisasi Fiskal, *Fiscal Stress,* dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 5(2), 229-252.

Oates, Wallace E. 1993. *Fiscal Decentralization and Economic Development.* National Tax Journal 46 (3): 237-243.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Pose, Andreas, dan Anne Kroijer. 2009. *Fiscal Decentralization and Economic Growth in Central and Eastern Europe. Journal of Growth and Change, 40/3, 387-418.*

Prijambodo, Bambang. 1995. Teori Pertumbuhan Endogen: Tinjauan Teoritis Singkat dan Implikasi Kebijaksanaannya. Perencanaan Pembangunan No.3.Pdf. Bappenas: Jakarta.

Prud'homme, R. 1995. *On the Danger of Decentralization.* Washington DC: The World Bank.

Pujiati, A. 2004. Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Karesidenan Semarang Era Desentralisasi Fiskal. Jurnal Ekonomi, 5(33), 61-70.

Ravallion M dan Datt G. 1996. *How important to India's poor is the sectoral composition of economic growth?* World Bank Economic Review 10 (1), 1-25

Rosdyana, D., Suhendra, E. S., dan Pasaribu, R.B.F. 2015. Pengauh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa Tahun 2009-2013.

Rustan. 2013. Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi, serta Kaitannya dengan Otonomi Daerah. Jurnal Borneo Administrator, Vol. 9, No. 3.

Rustiono, D. 2008. Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah.

Saputra, B. 2013. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat.

Shah, Anwar dan Theresa Thompson. 2002. *Implementing Decentralized Local Governance: A Treacherous Road with Potholes, Detours and Road Closures, Prepared for "Can Decentralization Help Rebuild Indonesia?", A Conference Sponsored by the International Studies Program*. Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University, Atlanta, May 1- 3, 2002.

Sianturi dan Miyasto. 2011. Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah (Studi Kasus Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Utara).

Sidig, Danar Sutopo. 2018. Desentralisasi Fiskal dan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia.

Sidik, Machfud. 2002. Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal.

Simanjuntak, Robert. (2002). Transfer pusat ke daerah: konsep dan praktik di beberapa negara (dana alokasi umum: konsep dan prospek di era otonomi daerah), Jakarta.

Sjafrizal. 2012. Ekonomi Perkotaan. Jakarta: Rajawali Pres.

Subana dan Sudrajat. 2005. Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah. Bandung: Pustaka Setia.

Suciayu, D. dan Fahmi Wibawa. 2012. Desentralisasi Fiskal dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Yogyakarta.

Sukirno, Sadono. 2006. Ekonomi Pembangunan Edisi Kedua. Kencana Prenada Media Group: Indonesia.

Todaro, M. P. 2000. Pembangunan Ekonomi: Edisi Kelima. Jakarta: Bumi Aksara.

Todaro, M. P. dan Stephen C. Smith. 2003. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jakarta: Erlangga.

Todaro, M. P. dan Stephen C. Smith. 2005. Pembangunan Ekonomi: Edisi Kesembilan. Jakarta: Erlangga.

Todaro, M. P. dan Stephen C. Smith. 2008. Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Erlangga.

Undang-Undang Nomor 22 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004.

UU No. 23 tahun 2014.

Wahyuni H. 2004. *Is There A Link Between Increased Growth And Reduced Income Inequality? Analysis Of CrossCountry Studies*. Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Vol 1, No.1, Februari, hal 1-9.

Wahyuni, I Gusti Ayu Putwahyunri, Made Sukarsa, dan Nyoman Yuliarni. 2014. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Waluyo J. 2004. Hubungan antara tingkat kesenjangan Pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi: Suatu studi lintas negara". Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol. 9 No. 1, Juni, hal: 1-20.

Yushkov, Andrey. 2015. *Fiscal Decentralization and Regional Economic Growth: Theory, Empirics, and the Russians Experience. Russian Journal of Economics 1,* 404-408.

Zulyanto, A. 2010. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu.